



IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN PESISIR

In Hutuely¹, Ali Hadi La Dimuru²
STIA Abdul Azis Kataloka Ambon¹²

E-mail: ninik.hutuely@gmail.com¹, hadiladimuru02@gmail.com²

ABSTRACT

Indonesia merupakan zona transisi antara darat dan laut dengan garis pantai yang panjang dan tersebar di seluruh nusantara, wilayah ini menyimpan beragam sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati. Pengembangan sektor pesisir dan kelautan menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan ekonomi. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan pesisir. Saat ini, kegiatan ekonomi di sektor tersebut masih didominasi oleh praktik tradisional, dengan penekanan pada penangkapan ikan dan rantai kegiatan yang dikelola langsung oleh nelayan setempat. Oleh karena itu perlunya implementasi program pemberdayaan dan bergantung pada peran aktif para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menempatkan nelayan pesisir sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pemberdayaan, Nelayan.

ABSTRACT

Indonesia is a transition zone between land and sea with a long coastline spread throughout the archipelago, this region contains various natural resources, both biological and non-biological. The development of the coastal and marine sectors is one of the strategic priorities in economic development. However, this potential has not been fully utilized to improve the welfare of the community, especially coastal fishermen. Currently, economic activities in this sector are still dominated by traditional practices, with an emphasis on fishing and a chain of activities managed directly by local fishermen. Therefore, it is necessary to implement an empowerment program and rely on the active role of stakeholders by placing coastal fishermen as the main actors and beneficiaries of development. This study uses a descriptive method, utilizing primary and secondary data as sources of information. The data collection process is carried out through interviews and observations, while data analysis is carried out by describing the results of the study based on the variables studied.

Keywords: Implementation, Empowerment Program, Fishermen.

PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat di kawasan pesisir Indonesia bekerja sebagai nelayan, karena kondisi geografis yang mendukung dan mempermudah mereka dalam menjalankan profesi tersebut. Profesi ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga nelayan di wilayah pesisir memiliki pengalaman dan keterampilan masih bersifat tradisional. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan. Kemiskinan ini tampak dari rendahnya pendapatan yang diperoleh, sehingga menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan yang memadai.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi nelayan di wilayah pesisir adalah kurangnya partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor kelautan di daerah. Oleh karena itu, implementasi program pemberdayaan menjadi sangat penting untuk membantu nelayan pesisir mencapai kemandirian dan mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Program ini perlu melibatkan nelayan sebagai aktor utama, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam setiap fase implementasi dan pengembangan program pemberdayaan.

Desain program pemberdayaan harus dilakukan dengan perhatian khusus tanpa menggeneralisasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya terutama di antara daerah pesisir yang berbeda. Tujuan dari implementasi program ini adalah untuk menggali potensi individu, kreativitas, dan kompetensi, serta meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik dari

sebelumnya. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, terutama nelayan pesisir yang tidak hanya mencakup penguatan individu atau kelompok nelayan tetapi juga memperkuat pranata sosial yang mendukung mereka.

Namun, jika diamati secara langsung di lapangan, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan nelayan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan mereka pada kegiatan melaut dan rendahnya keterampilan dalam menangkap ikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dikalangan nelayan, terbatasnya modal usaha dan minimnya akses terhadap teknologi penangkapan yang modern, hubungan kerja yang tidak seimbang antara pemilik perahu dan nelayan buruh, sulitnya melakukan diversifikasi usaha di luar sektor penangkapan ikan, ketergantungan yang kuat pada aktivitas melaut serta pola hidup boros yang kurang berfokus pada perencanaan masa depan, sistem pemasaran hasil tangkapan yang lebih menguntungkan pedagang perantara dibandingkan dengan nelayan.

Disamping itu, ketertinggalan secara ekonomi dan sosial, terutama dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan, sebagian besar nelayan pesisir tinggal di daerah kumuh dengan lingkungan yang kurang bersih dan tidak sehat, pendapatan nelayan pesisir yang tidak stabil, banyak kapal nelayan yang mengalami kerusakan, sehingga menghambat kegiatan mereka.

Kondisi-kondisi ini jelas berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir. Oleh

karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius dalam menyediakan program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir seperti program implementasi pemberdayaan nelayan pesisir. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir di Desa Waesala Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta sebagaimana adanya, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel-variabel lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada penjelasan dan analisis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waesala Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam menentukan informan, peneliti memilih informan kunci, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan atau terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1984) yang mencakup empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan menjelaskan gambaran tentang implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir Desa Waesala Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, peneliti melakukan observasi di lapangan. Pendekatan ini di ikuti dengan wawancara kepada informan, dan hasilnya akan diuraikan dalam penelitian ini. Variabel yang diteliti diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) mencakup semua individu yang terlibat dalam organisasi atau kegiatan dengan membawa keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. SDM melibatkan aspek fisik, mental, dan kreativitas yang berperan penting dalam operasional dan pengembangan suatu usaha atau organisasi. Selain merujuk pada tenaga kerja, Sumber daya manusia (SDM) juga mencakup aspek kualitas seperti pendidikan, pelatihan, motivasi, dan pengalaman yang mempengaruhi produktivitas.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan dan pemberdayaan sangat penting agar setiap individu mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul dalam lingkungan kerja. Dalam konteks pemberdayaan nelayan pesisir, pengembangan sumber daya manusia (SDM) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan,

sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir belum optimal. Ini tercermin dari minimnya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, serta kurangnya variasi dalam jenis pendampingan dan pelatihan yang disediakan dalam program pemberdayaan. Selain itu, rendahnya perhatian dan peran pemerintah daerah setempat dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan juga menjadi faktor yang menghambat. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran usaha kelompok nelayan pesisir dan akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan hidup mereka.

Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kinerja suatu kelompok agar lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan berbagai langkah seperti pembinaan, dukungan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan kelompok. Selain itu, pengembangan kelompok bertujuan memperkuat kerja sama, meningkatkan koordinasi, dan memotivasi partisipasi aktif anggota dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Melalui pengembangan kelompok, anggota didorong untuk saling berbagi pengetahuan,

mengasah keterampilan baik secara individu maupun kolektif, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas kelompok, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kemandirian mereka. Berkaitan dengan pemberdayaan nelayan pesisir, pengembangan kelompok melibatkan pemberian bantuan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kelompok dalam implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari kurangnya bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan, minimnya jumlah kelompok nelayan yang tersedia, serta rendahnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Akibatnya, upaya pengembangan kelompok nelayan untuk mewujudkan usaha produksi terhambat, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kelancaran usaha budidaya mereka.

Ketersediaan Informasi

Ketersediaan informasi mengacu pada kondisi di mana data atau informasi yang relevan dan diperlukan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkannya dalam bentuk yang jelas dan bermanfaat. Informasi ini harus dikelola dan disajikan secara efektif agar dapat dipahami serta dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemberdayaan nelayan pesisir, ketersediaan

informasi berarti memastikan bahwa nelayan memiliki akses mudah terhadap informasi terkait program-program pemberdayaan, bantuan, teknik budidaya, dan pemasaran.

Dengan akses informasi yang baik, kelompok nelayan dapat membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih efektif. Ketersediaan informasi yang optimal juga akan mendorong partisipasi aktif nelayan dalam program pemberdayaan dan memfasilitasi pemanfaatan peluang yang ada secara maksimal. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan saluran informasi dari kelompok nelayan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program pemberdayaan kelompok nelayan pesisir di Desa ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyediaan informasi mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan saluran informasi dan bentuk informasi yang dimiliki oleh nelayan pesisir, serta minimnya inisiatif dari nelayan untuk mendorong akses informasi kepada pemerintah daerah. Selain itu, terdapat juga kurangnya penyediaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan yang ada. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan kelompok nelayan dalam meningkatkan usaha mereka.

Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan proses peningkatan kapasitas, kinerja, dan daya saing suatu

bisnis agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Proses ini mencakup berbagai langkah, seperti inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, perencanaan strategi pemasaran, serta pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai pertumbuhan usaha yang optimal. Pengembangan usaha juga melibatkan upaya untuk mengidentifikasi peluang baru, mengoptimalkan proses operasional, dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, diperlukan dukungan berupa modal, pelatihan, dan sarana yang memadai agar usaha dapat terus bersaing di pasar.

Dalam pemberdayaan nelayan pesisir, pengembangan usaha meliputi peningkatan keterampilan dan pengetahuan nelayan melalui pelatihan, akses ke modal, serta perluasan jaringan pemasaran. Tujuan dari pengembangan ini adalah membantu nelayan mengelola usaha mereka dengan lebih efektif, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta komunitas di sekitarnya. Hal ini relevan dengan upaya kelompok nelayan pesisir dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam pengembangan usaha di desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan pesisir belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan pesisir, kurangnya strategi yang diterapkan untuk mengembangkan usaha, rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki nelayan, serta kurangnya inisiatif dari kelompok nelayan untuk membuka akses pemasaran bagi usaha mereka.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi produktivitas nelayan pesisir, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan usaha mereka secara lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan: a) Program pelatihan dan penyuluhan memiliki keterbatasan dalam meningkatkan sumber daya manusia para nelayan. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan pesisir. Sebagian nelayan masih mengandalkan metode tradisional dalam menjalankan usaha mereka. b) Pengembangan kelompok nelayan belum berlangsung secara efektif, disebabkan oleh kurangnya bantuan dan fasilitas serta jumlah kelompok yang terbatas.

Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi kelompok nelayan dalam mencapai tujuan bersama dan meningkatkan produksi yang akhirnya berdampak pada keberlanjutan usaha mereka. c) Saluran informasi yang tidak efektif dan kurangnya inisiatif dari nelayan untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah mengakibatkan partisipasi mereka dalam program pemberdayaan menjadi kurang maksimal. Situasi ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dan memanfaatkan peluang secara efektif. d) Proses pengembangan usaha nelayan pesisir menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan tentang teknik budidaya, keterbatasan modal dan sarana pendukung, serta kurangnya

strategi pemasaran. Meskipun ada bantuan dan pelatihan yang diberikan, upaya pengembangan usaha belum berhasil secara signifikan meningkatkan daya saing nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan. Alfabeta CV: Bandung.
- Anwas, Oos M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. ALFABETA. CV: Bandung.
- Guntur Setiawan. 2004. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Imron. 2003. Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial. Penerbit PT. Gramedia: Jakarta.
- Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Ar- Ruzz Media: Yogyakarta.
- Mardikanto dkk., 2013. Memberdayakan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung.
- Mulyadi. 2007. Ekonomi Kelautan, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Muhaimin, dkk., 2009. Manajemen Pendidikan, Kencana : Jakarta
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo: Jakarta.
- Riggs, Fred. W., 2005. Administrasi Negara-negara Berkembang-Teori Masyarakat Prismatis. Rajawali: Jakarta.
- Sadhana, Kridawati. 2013. Realiatas Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga, UM Press: Malang.
- Sastrawidjaya. 2002, Nelayan dan Kemiskinan, Penerbit Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Penerbit Gava Media : Yogyakarta.

- Widodo, Joko, 2014. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media Publishing: Malang.
- Widiastuti, Siti Kurnia dkk., 2015. Pemberdayaan Masyarakat Marginal, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Zainal, Arifin. 2010. Evaluasi Program. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bahan Ajar: Bandung.
- Zubaedi, 2007. Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ar Ruzz Media: Jakarta.

